

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU PRAKERJA DI KOTA PEKALONGAN

Harnum Tiara Arnie – 14010120130086

Program Studi Ilmu Pemerintahan Departemen Politik Pemerintahan FISIP,
Universitas Diponegoro, Semarang – Indonesia

ABSTRAK

Program Kartu Prakerja yang sistemnya terpusat menjadikan peserta program langsung terhubung dengan Pemerintah Pusat. Perpres No. 36 Tahun 2020 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah berperan dalam mendukung pelaksanaan Program Kartu Prakerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan hambatan Dinperinaker dalam implementasi Program Kartu Prakerja di Kota Pekalongan ditinjau dengan teori implementasi kebijakan Grindle. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Adapun datanya diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sosialisasi berhasil dilaksanakan melalui pertemuan langsung dan pemberian informasi melalui media sosial. Dinperinaker berhasil memanfaatkan website E-Makaryo dan media sosial untuk menyebarkan informasi kebutuhan tenaga kerja daerah. Berkaitan dengan fasilitasi, Dinperinaker telah memberikan fasilitas pelayanan umum dan fasilitas untuk penyandang disabilitas. Adapun pendampingan dilakukan dengan memberikan rekomendasi pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Namun, peran penyediaan data Lembaga Pelatihan dan sistem berbagi biaya belum berhasil terlaksana karena adanya hambatan, yaitu keterbatasan akses Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program. Pemerintah Daerah tidak diberi akses data-data penerima, tidak dilibatkan dalam seleksi pemilihan Jenis Pelatihan, serta tidak berperan dalam alokasi anggaran program. Dari penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Kartu Prakerja di Dinperinaker sejatinya tidak ditemukan peran yang dilaksanakan secara signifikan. Peran yang dilaksanakan oleh Dinperinaker hanya sebatas teknis yang sebenarnya sudah merupakan tugas pokok Dinperinaker. Dalam memaksimalkan Program Kartu Prakerja di daerah, sebaiknya pemerintah membangun sistem yang kolaboratif yaitu mengedepankan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Kata Kunci: Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Program Kartu Prakerja

ABSTRACT

The centralized system of the Pre-Employment Card Program means program participants are directly connected to the Central Government. Presidential Decree No. 36 of 2020 states that the Regional Government plays a role in supporting the implementation of the Pre-Employment Card Program. This research aims to determine the role and obstacles of the Dinperinaker in implementing the Pre-Employment Card Program in Pekalongan City in terms of Grindle policy implementation theory. The method used is qualitative. The data was obtained from observation, interviews and documentation. The research results showed that socialization was successfully carried out through direct meetings and providing information via social media. Dinperinaker has succeeded in utilizing the E-Makaryo website and social media to disseminate information on regional workforce needs. Regarding facilitation, Dinperinaker has provided public service facilities and facilities for people with disabilities. Assistance is carried out by providing training recommendations tailored to regional needs. However, the role of providing data on Training Institutions and the cost sharing system has not been successfully implemented due to obstacles, namely limited access by the Regional Government in implementing the program. Regional governments are not given access to

recipient data, are not involved in selecting the type of training, and do not play a role in program budget allocation. From this research, it can be concluded that the implementation of the Pre-Employment Card Program at Dinperinaker actually did not find a significant role. The role carried out by Dinperinaker is only technical which is actually the main task of Dinperinaker. In maximizing the Pre-Employment Card Program in the regions, the government should build a collaborative system, namely prioritizing cooperation between the Central Government and Regional Governments.

Keywords: Policy, Policy Implementation, Pre-Employment Card Program

PENDAHULUAN

Ditengah permasalahan tenaga kerja di Indonesia akibat pandemi, pemerintah menetapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Salah satu bentuk upayanya adalah dengan menghadirkan Program Kartu Prakerja. Mulanya, Program Kartu Prakerja merupakan gagasan yang disampaikan Presiden Jokowi pada tahun 2019 untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia (Kemenko Bidang Perekonomian, 2020). Selain terbatasnya lapangan pekerjaan, masalah utama ketenagakerjaan di Indonesia adalah rendahnya produktivitas masyarakat Indonesia yang disebabkan oleh adanya *skill gap*. Hasil survei BPS menggambarkan bahwa jumlah angkatan kerja yang belum pernah mengikuti pelatihan bersertifikat sebanyak 90%. Saat ini, pelatihan bersertifikat bukan prioritas bagi para pekerja dan perusahaan. Terlihat dari survei ILO tahun 2019 tentang Produktivitas Tenaga Kerja, Indonesia

menjadi negara urutan ke-5 di ASEAN. Kemudian data Bank Dunia 2018, menunjukkan bahwa para pekerja memposisikan pendidikan dan pelatihan sebagai prioritas paling akhir (urutan ke 10 dari 10). Data Bank Dunia lainnya yaitu perusahaan tidak menempatkan pendidikan dan pelatihan sebagai prioritas pertama (urutan ke 6 dari 10) (Kemenko Bidang Perekonomian, 2021). Oleh karena itu, Program Kartu Prakerja hadir sebagai solusi untuk mengatasi *skill gap* tersebut.

Kemudian di tahun 2020, ditetapkanlah Perpres No. 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Kartu Prakerja yang kemudian diperbarui dalam Perpres No. 76 Tahun 2020. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa Program Kartu Prakerja merupakan bagian dari bantuan sosial (bansos) untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19. Namun dalam perkembangannya, Kartu Prakerja tidak lagi dijalankan dengan skema semi bansos. Pada tahun 2023, pemerintah mengubah skema

program menjadi normal yang tertuang dalam Perpres No. 113 tahun 2022.

Program Kartu Prakerja merupakan salah satu program *upskilling* dan *reskilling* untuk para pekerja dan pencari kerja. Program ini menjadi salah satu program untuk mengembangkan kualitas SDM dan mengurangi *skill gap* angkatan kerja di Indonesia. Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Denni Puspa, mengatakan bahwa Program Kartu Prakerja merupakan program peningkatan kualitas SDM Indonesia yang terbuka bagi semua orang. Lebih lanjut dikatakan bahwa *skill gap* yang terjadi bukan hanya dihadapi oleh pencari kerja, tetapi juga para pekerja dan pelaku usaha (Kemenko Bidang Perekonomian, 2020). Diluncurkan pada masa pandemi, Program Kartu Prakerja juga menjadi program Jaring Pengaman Sosial bersama dengan 6 program lainnya yaitu Program Keluarga Harapan, BLT Desa, Bantuan Sembako, Bantuan Subsidi Upah, Insentif Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, dan Bantuan Subsidi Listrik (Septiyadi & Rahayu, 2022).

Mengutip dari laman resmi Program Kartu Prakerja (Prakerja.go.id., <https://www.prakerja.go.id/>, akses 30 Oktober 2022), Kartu Prakerja adalah program yang dibuat oleh pemerintah untuk mengembangkan kompetensi kerja.

Program ini diberikan untuk para pencari kerja, pekerja yang terkena PHK, pekerja yang memerlukan peningkatan kompetensi, dan pelaku usaha mikro. Adapun tujuan program ini adalah pengembangan kompetensi, peningkatan produktivitas, dan daya saing angkatan kerja, serta pengembangan kewirausahaan. Program ini dapat diikuti oleh masyarakat yang berusia 18 tahun hingga 64 tahun yang sedang tidak mengikuti pendidikan formal. Anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk program ini adalah sebesar 20 triliun di tahun 2020, 21,2 triliun di tahun 2021, 18 triliun di tahun 2022, dan 4,3 triliun di tahun 2023. Dari tahun 2020 hingga 2023, sebanyak 17,6 juta orang telah menjadi penerima manfaat Program Kartu Prakerja (antaranews.com, <https://www.antaranews.com/berita/3708582/jumlah-peserta-prakerja-di-indonesia-capai-76-juta-orang>, akses 5 Januari 2024).

Pelaksanaan Program Kartu Prakerja di Kota Pekalongan dijalankan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) sebagai turunan dari Pemerintah Pusat yang ada di daerah. Dinperinaker bertugas untuk mensosialisasikan Program Kartu Prakerja kepada seluruh masyarakat Kota Pekalongan, terutama bagi para pencari kerja yang ingin mengembangkan kompetensinya. Disamping memperoleh

kompetensi kerja, insentif yang diterima juga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di kala pandemi.

Dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja, peran Pemerintah Daerah begitu penting dalam mensosialisasikan program. Dinperinaker Kota Pekalongan dalam hal ini melalui Bidang Penempatan Kerja, Pelatihan, dan Produktivitas (Pentalatas) menginformasikan kepada masyarakat Pekalongan melalui website resminya, bahwa masyarakat dapat berkonsultasi mengenai Program Kartu Prakerja. Dinperinaker Kota Pekalongan juga mengajak masyarakat Kota Pekalongan, khususnya bagi para pencari kerja dan pekerja yang terkena PHK untuk datang ke kantor Dinperinaker agar dapat dipandu tentang pendaftaran Kartu Prakerja, atau pendaftarannya dapat diakses secara langsung melalui website prakerja.go.id (dinperinaker.pekalongankota.go.id, <https://dinperinaker.pekalongankota.go.id/berita/emakaryo-dan-kartu-pra-kerja.html>, akses 30 Oktober 2023). Namun, kurangnya literasi masyarakat seringkali menghambat sosialisasi yang telah dilakukan Dinperinaker Kota Pekalongan. Faktanya, masyarakat Kota Pekalongan masih banyak yang belum mengetahui Program Kartu Prakerja ini.

Program Kartu Prakerja sejatinya memberikan banyak manfaat bagi

masyarakat yang menerimanya. Program ini dinilai tepat, karena diluncurkan ketika situasi pandemi Covid-19 yang mana pada saat itu perekonomian masyarakat sedang terpuruk. Namun, permasalahan mengenai implementasi program merupakan tanggung jawab pemerintah yang harus segera dituntaskan agar implementasi Program Kartu Prakerja ini benar-benar sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Kartu Prakerja merupakan program yang dilaksanakan dengan sistem *online* dan terpusat. Hal ini berarti calon peserta Kartu Prakerja langsung terhubung dengan Pemerintah Pusat tanpa melalui birokrasi di daerah. Oleh karena itu, menjadi menarik untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam mendukung implementasi Program Kartu Prakerja serta hambatan-hambatan yang dialami Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program. Pada penelitian ini, peneliti akan memfokuskan pada peran Pemerintah Daerah dalam mendukung implementasi Program Kartu Prakerja di Kota Pekalongan serta hambatan-hambatannya. Penelitian ini akan dilakukan di Dinperinaker Kota Pekalongan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang meneliti suatu fenomena atau

peristiwa dimana kedudukan peneliti sebagai instrumen kunci. Rahmadi (Rahmadi, 2011: 90) menyebutkan bahwa, “Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berkesinambungan sehingga tahap pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data dilakukan secara bersamaan pada saat penelitian”. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang sifatnya deskriptif dan mengacu pada satuan kualitas. Lokasi penelitian ini terletak di kantor Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Kota Pekalongan. Adapun subjeknya adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan dan para pegawai, Pimpinan LPK Pembangunan, dan masyarakat penerima Program Kartu Prakerja di Kota Pekalongan.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sehingga datanya bersifat deskriptif dan subjektif. Data dapat berupa peristiwa, gejala, dan kejadian yang kemudian dianalisis (Kusumastuti & Khoiron, 2019: 30). Data kualitatif adalah data deskriptif dalam bentuk teks, kata-kata, atau uraian yang mempresentasikan suatu keadaan atau peristiwa yang sedang diteliti. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan, seperti data hasil observasi lapangan dan data hasil wawancara dengan informan.

Data sekunder merupakan data yang sudah ada sebelumnya yang dapat digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Beberapa data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen dari instansi terkait, arsip, surat, buku, dan jurnal. Adapun analisis dan interpretasi data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu mereduksi data, menyajikan data, serta menarik kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Program Kartu Prakerja

1. Sosialisasi Pelaksanaan Program

Pelaksanaan sosialisasi dilakukan melalui dua cara yaitu secara langsung dan tidak langsung. Sosialisasi secara langsung dilakukan Dinperinaker dengan mengadakan pertemuan yang melibatkan para lulusan SMA/SMK dan para pencari kerja. Berdasarkan wawancara, sosialisasi secara langsung hanya dilakukan beberapa kali saja. Pertemuan secara langsung ini tidak banyak dilakukan karena adanya pembatasan sosial yang ditetapkan pemerintah pada saat itu. Dalam hal ini, Dinperinaker membuat strategi yaitu menyelipkan materi-materi sosialisasi Program Kartu Prakerja ke dalam sosialisasi ketenagakerjaan yang biasanya rutin dilakukan, sehingga Dinperinaker

tidak perlu mengadakan sosialisasi khusus untuk Program Kartu Prakerja.

Selain melakukan sosialisasi secara langsung, Dinperinaker juga melaksanakan sosialisasi secara tidak langsung yaitu dengan menggunakan media cetak dan online. Penggunaan media cetak biasanya dengan menempelkan poster di papan informasi atau menyebarkan leaflet atau selebaran kepada masyarakat, sedangkan melalui media online (Website, Facebook, Instagram, YouTube) Dinperinaker dapat mengunggah informasi mengenai Program Kartu Prakerja. Selain memberikan informasi, Dinperinaker juga menginfokan ketika sudah dimulai pendaftaran gelombang Program Kartu Prakerja. Adanya pembatasan pada saat pandemi mengharuskan Dinperinaker menyusun strategi agar sosialisasi tetap bisa dilakukan secara masif. Oleh karena itu, sosialisasi secara tidak langsung ini memang menjadi kunci utama dalam menyebarkan informasi-informasi terkait dengan Program Kartu Prakerja.



Gambar 1. Sosialisasi Program Kartu Prakerja secara langsung

Sumber:

dinperinaker.pekalongankota.go.id

2. Penyediaan Data Lembaga Pelatihan yang Berkualitas di Daerah

Penyediaan data lembaga pelatihan merupakan salah satu fungsi Dinperinaker yang tertuang dalam Permenaker No. 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja yaitu melakukan fasilitasi perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja. Selain itu, Dinperinaker juga berperan dalam proses akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yaitu dilibatkan dalam LALPK (Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja) yang bertugas melaksanakan penilaian atau asesmen akreditasi.

Dalam penyediaan data Lembaga Pelatihan, Dinperinaker dikatakan tidak berhasil karena tidak memiliki strategi khusus. Dinperinaker hanya mendata Lembaga Pelatihan tanpa memilah Lembaga Pelatihan yang berkualitas. Hal ini pun dilakukan karena memang sudah tugas Dinperinaker dan bukan secara khusus didata untuk Program Kartu Prakerja. Tidak dilakukannya pendataan Lembaga Pelatihan secara khusus untuk Program Kartu Prakerja ini, dikarenakan Program Kartu Prakerja dilaksanakan seluruhnya oleh Manajemen Pelaksana. Dalam melaksanakan seleksi Lembaga Pelatihan, Manajemen Pelaksana hanya melibatkan tim ahli independen. Manajemen Pelaksana sama sekali tidak

melibatkan Pemerintah Daerah dalam proses seleksi Lembaga Pelatihan.

3. Penyediaan Data Kebutuhan Tenaga Kerja oleh Industri Daerah

Dukungan lain yang wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah penyediaan data kebutuhan tenaga kerja di daerah. Berdasarkan hasil wawancara, Dinperinaker tidak secara khusus menyediakan kebutuhan tenaga kerja untuk Program Kartu Prakerja, karena program ini tidak sampai pada pemenuhan kebutuhan kerja. Program Kartu Prakerja hanya memfasilitasi penerima manfaat sampai pada pelatihan untuk meningkatkan keterampilan.

Berdasarkan hasil penelitian, penyediaan data kebutuhan tenaga kerja oleh Dinperinaker telah berhasil. Dinperinaker berhasil menyebarkan informasi terkait dengan kebutuhan tenaga kerja di daerah melalui website dan media sosial, sehingga masyarakat mengetahui informasi lowongan-lowongan pekerjaan hingga melamar pekerjaan tersebut. Keberhasilan dalam penyediaan kebutuhan tenaga kerja ini dibuktikan dengan strategi Dinperinaker yang sudah tepat. Dalam penyediaan data ini, Dinperinaker mengandalkan website atau aplikasi e-makaryo untuk menyediakan data-data kebutuhan tenaga kerja. Selain itu, Dinperinaker juga memiliki strategi yaitu memberikan informasi lowongan

pekerjaan melalui website Dinperinaker dan media sosial Dinperinaker. Hal ini menjadikan data-data yang dimiliki Dinperinaker tersebar luas ke masyarakat. Ada juga informasi jobfair-jobfair yang digelar di Kota Pekalongan sehingga masyarakat dapat memantau serta mengikuti informasi lowongan-lowongan pekerjaan di Kota Pekalongan dengan mudah.

4. Fasilitasi Pendaftaran Peserta dan Pemilihan Jenis Pelatihan

Dalam Program Kartu Prakerja, Dinperinaker berperan dalam menyediakan fasilitas-fasilitas pendaftaran dan pemilihan jenis pelatihan. Menurut data hasil wawancara, Dinperinaker telah melaksanakan fasilitasi pendaftaran dan pemilihan jenis pelatihan untuk para peserta program. Berdasarkan wawancara dan observasi, Dinperinaker telah memberikan fasilitas-fasilitas pelayanan seperti ruang pelayanan umum dan disabilitas, meja, kursi, AC, Komputer, ATK yang lengkap untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kelengkapan ini tentu sangat menunjang keberhasilan Program Kartu Prakerja di Kota Pekalongan. Selain itu, juga sudah disediakan fasilitas khusus untuk penyandang disabilitas.



Gambar 2. Fasilitas ruang pelayanan Dinperinaker

Pelaksanaan fasilitasi pendaftaran dan pemilihan jenis pelatihan telah berhasil dilaksanakan. Adanya fasilitasi menjadikan masyarakat yang kesulitan mendaftar atau memilih jenis pelatihan terbantu. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, adanya fasilitasi menjadikan banyak masyarakat datang ke kantor Dinperinaker meminta untuk dibantu dalam pendaftaran Program Kartu Prakerja. Keberhasilan fasilitasi Program Kartu Prakerja juga dikarenakan strategi Dinperinaker dalam melakukan fasilitasi pendaftaran dan pemilihan jenis pelatihan Program Kartu Prakerja sudah tepat. Strategi Dinperinaker yaitu memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan fasilitasi pendaftaran dan pemilihan jenis pelatihan dalam Program Kartu Prakerja lebih banyak dilakukan melalui media sosial Dinperinaker. Pada saat pandemi yang mana terdapat juga pembatasan sosial, tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat lebih banyak

mengakses segala informasi melalui internet atau media sosial. Oleh karena itu, Dinperinaker melihat peluang ini dan memanfaatkan media sosialnya untuk menyebarkan informasi mengenai Program Kartu Prakerja. Walaupun sebenarnya strategi ini masih memiliki kekurangan yaitu beberapa informasi fasilitasi yang tidak tersampaikan kepada beberapa masyarakat yang tidak memiliki akses internet dan tidak mengikuti media sosial Dinperinaker.

5. Sistem Berbagi Biaya Pendanaan Program Kartu Prakerja

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2020, anggaran Program Kartu Prakerja berasal dari APBN. Dalam hal ini, daerah hanya bersifat sebagai pendukung dan tidak wajib menganggarkan sejumlah dana untuk Program Kartu Prakerja. Terlebih program ini dilaksanakan secara online oleh Manajemen Pelaksana di pusat, sehingga Pemerintah Daerah tidak mengelukan adanya kebutuhan untuk berbagi biaya dalam program Kartu Prakerja. Berdasarkan hasil wawancara, Dinperinaker tidak menganggarkan dana khusus untuk Program Kartu Prakerja. Dalam pelaksanaan sosialisasi secara langsung dan pengadaan leaflet, Dinperinaker menggunakan dana APBD yang biasanya sudah dianggarkan untuk pelatihan umum yang sudah biasa dilaksanakan di Dinperinaker.

6. Pendampingan kepada Penerima Manfaat Program Kartu Prakerja dan Usaha Kecil Menengah

Dalam Program Kartu Prakerja, Dinperinaker hanya melaksanakan pendampingan pada pendaftaran program dan pemilihan jenis pelatihan. Artinya, pendampingan tidak sampai pada pendampingan setelah menerima manfaat program, karena Dinperinaker tidak memiliki akses data masyarakat yang menerima program. Dalam hal ini, Dinperinaker membuka layanan offline dari Senin-Jumat pada jam kerja untuk masyarakat yang ingin mendaftar Program Kartu Prakerja. Pegawai/Staff bidang Pentalatas akan membantu dan memandu masyarakat yang kesulitan mendaftar program. Dinperinaker juga akan membantu dan merekomendasikan beberapa pelatihan jika masyarakat masih bingung menentukan pemilihan jenis pelatihan. Disampaikan oleh pegawai Dinperinaker bahwa apabila masyarakat kesulitan mendaftar, bisa langsung datang ke kantor dengan membawa KTP untuk dibantu didaftarkan.



Gambar 3. Pendampingan Pendaftaran Program Kartu Prakerja

Sumber:

dinperinaker.pekalongankota.go.id

Sementara itu, untuk pendampingan kepada UKM telah dilakukan secara rutin oleh Dinperinaker setiap tahunnya melalui unit inkubator bisnis dan teknologi yaitu pelatihan dan pengembangan wirausaha berbasis pengembangan usaha kreatif dan inovatif (Tenant). Sebelum diadakannya Program Kartu Prakerja memang kegiatan ini sudah dilaksanakan Dinperinaker. Sejak tahun 2012 hingga 2021 telah terdapat 53 wirausaha binaan Tenant (pekalongankota.go.id, <https://pekalongankota.go.id/berita/digelar-rutin-dinperinaker-terus-tumbuhkan-tenant-binaan.html>, 15 Januari 2024). Para wirausaha binaan ini adalah pemenang dari lomba pelatihan dan pengembangan usaha kreatif dan inovatif yang diadakan setiap tahun oleh Dinperinaker.

B. Hambatan Program Kartu Prakerja

1. Hambatan Internal

Dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja, Dinperinaker mengalami beberapa hambatan yang berasal dari dalam Dinperinaker sendiri. Hambatan pertama, tidak adanya petunjuk teknis mengenai pelaksanaan Program Kartu Prakerja di Dinperinaker. Hambatan kedua yaitu Dinperinaker tidak menganggarkan sejumlah dana untuk mendukung Program Kartu Prakerja di daerah. Hal ini menjadi hambatan besar dalam penyelenggaraan program karena fungsi anggaran begitu penting untuk berjalannya suatu program. Hambatan berikutnya berkaitan dengan fasilitasi pendaftaran dan pemilihan jenis pelatihan yaitu kurangnya kapasitas SDM yang mengurus Program Kartu Prakerja. Berkaitan juga dengan fasilitasi, hambatan lainnya adalah kurangnya fasilitas jaringan WiFi. Program Kartu Prakerja merupakan program yang seluruh proses pelaksanaannya dilakukan secara online, sehingga membutuhkan akses internet. Saat itu Dinperinaker di bidang Pentalatas hanya memiliki satu jaringan WiFi. Hal ini menyebabkan terbatasnya pengguna yang dapat mengakses WiFi sehingga menyulitkan dalam proses pendaftaran.

2. Hambatan Eksternal

Secara garis besar, hambatan eksternal dalam Program Kartu Prakerja adalah kurangnya kerja sama atau

kolaborasi antara Manajemen Pelaksana dengan Pemerintah Daerah. Manajemen Pelaksana memiliki peran yang besar, sedangkan Pemerintah Daerah hanya berperan sebagai pendukung dalam pelaksanaan program. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah hanya menunggu arahan dari pusat dan tidak bisa menetapkan suatu keputusan untuk daerah. Pertama, terbatasnya akses akun peserta Program Kartu Prakerja. Dinperinaker sebagai pelaksana pendukung program di daerah diamanahkan untuk memfasilitasi pendaftaran. Namun, Dinperinaker tidak diberi akses untuk membuka akun peserta, sehingga apabila terjadi kesalahan Dinperinaker sulit untuk mengatasinya. Hambatan lainnya yaitu terbatasnya akses terhadap data-data penerima program. Dalam Program Kartu Prakerja, Dinperinaker tidak diberitahu data masyarakat Kota Pekalongan yang lolos dalam program. Masalah ini menjadikan Dinperinaker tidak dapat melakukan pemantauan terhadap penerima. Dalam Program Kartu Prakerja, Dinperinaker tidak dilibatkan dalam proses seleksi penerimaan peserta dan Lembaga Pelatihan.

PENUTUP

Simpulan

Pelaksanaan Program Kartu Prakerja di Dinperinaker Kota Pekalongan

sejatinya tidak ditemukan peran yang dilaksanakan secara signifikan. Peran yang dilaksanakan oleh Dinperinaker hanya sebatas teknis yang sebenarnya sudah merupakan tugas pokok Dinperinaker. Dalam hal ini, Pemerintah Pusat hanya menginginkan komitmen dari Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan Program Kartu Prakerja di daerah.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam rangka mendukung implementasi Program Kartu Prakerja, Dinperinaker telah berhasil melaksanakan empat peran dari enam peran yang diamanahkan dalam Perpres No. 36 Tahun 2020. Peran yang berhasil dilaksanakan yaitu sosialisasi pelaksanaan program, penyediaan data kebutuhan tenaga kerja, fasilitasi pendaftaran dan pemilihan jenis pelatihan, dan pendampingan. Namun, pelaksanaan peran hanya sebatas pada yang tercantum dalam perpres tanpa adanya petunjuk teknis dan hubungan fungsional dengan Manajemen Pelaksana. Hal ini menimbulkan perbedaan persepsi mengenai bentuk peran yang harus dilaksanakan Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan hambatan-hambatan yang dialami oleh Dinperinaker, sejatinya disebabkan oleh besarnya peran Manajemen Pelaksana dan minimnya peran Dinperinaker dalam pelaksanaan operasional Program Kartu Prakerja.

Manajemen Pelaksana memiliki peran yang besar yaitu terlibat dalam semua proses seleksi peserta dan LPK, sedangkan peran Dinperinaker hanya menjalankan perintah atau tugas dari pusat. Hal ini menghambat pelaksanaan peran penyediaan data LPK di daerah dan sistem berbagi biaya karena seluruhnya telah dilaksanakan oleh Manajemen Pelaksana. Dalam hal ini, terlihat bahwa tidak adanya kerja sama atau kolaborasi yang baik antara Dinperinaker dan Manajemen Pelaksana.

Saran

Saran yang dapat disampaikan yaitu:

- a. Pemerintah Pusat seharusnya membangun ekosistem yang kolaboratif antara Manajemen Pelaksana dengan Dinperinaker. Kolaborasi dilakukan dengan pembagian peran sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan pelaksana, sehingga Program Kartu Prakerja dapat berjalan dengan optimal. Dalam hal ini, seharusnya Dinperinaker dilibatkan dalam proses seleksi peserta dan Lembaga Pelatihan daerah, karena Dinperinaker dinilai lebih mengetahui karakteristik dan kebutuhan warganya.
- b. Fungsi anggaran yang begitu penting bagi sebuah kebijakan atau program seharusnya tidak diabaikan oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah seharusnya mengalokasikan sejumlah dana agar

peran Dinperinaker dalam mendukung Program Kartu Prakerja dapat terlaksana dengan baik.

- c. Berkaitan dengan fasilitasi, Dinperinaker sebaiknya menyediakan SDM khusus untuk melayani pendaftaran Program Kartu Prakerja. Kemudian juga diperlukan perbaikan pada jaringan WIFI serta penambahan Komputer atau PC agar memudahkan masyarakat yang ingin mendaftar Program Kartu Prakerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Andina, E. (2022). Peran Pemerintah Daerah dalam Implementasi Program Kartu Prakerja di Provinsi Jawa Barat. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 13(1), 37–57.
- Anggara, S. (2018). *Kebijakan Publik* (Cetakan 2). Bandung: CV. Pustaka Setia.
- antaranews.com. (2023). *Jumlah Peserta Prakerja di Indonesia Capai 17,6 Juta Orang*. Antara. <https://www.antaranews.com/berita/3708582/jumlah-peserta-prakerja-di-indonesia-capai-176-juta-orang> (diakses pada 5 Januari 2024).
- Awan, Y. Abdoellah; Rusfiana, Y. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2020. *Badan Pusat Statistik, XXIII*, 05(91), 1–24. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/11/05/1673/agustus-2020--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-7-07-persen.html>
- Basri, H., & Rusdiana, A. (2015). *Manajemen Pendidikan dan Pelatihan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- BPS Kota Pekalongan. (2021). *Kota Pekalongan dalam Angka 2021*. Pekalongan: BPS Kota Pekalongan.
- BPS Kota Pekalongan. (2023a). *Kota Pekalongan dalam Angka 2023*. Pekalongan: BPS Kota Pekalongan.
- BPS Kota Pekalongan. (2023b). *Profil Ketenagakerjaan Kota Pekalongan Hasil Sakernas 2022*. Pekalongan: BPS Kota Pekalongan.
- BPS Kota Pekalongan. (2023c). *Profil Pendidikan Kota Pekalongan 2022*. Pekalongan: BPS Kota Pekalongan.
- Bukit, B., Malusa, T., & Rahmat, A. (2017). *Pengembangan Sumber Daya Manusia: Teori, Dimensi Pengukuran, dan Implementasi dalam Organisasi*. Yogyakarta: Zahr Publishing.
- Cnbcindonesia.com. (2023). *Dana Prakerja 2022 Cair Rp17,8 T, Dibagi ke 4,9 Juta Orang*. Cnnindonesia.Com. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230105170445-4-403180/dana-prakerja-2022-cair-rp178-t-dibagi-ke-49-juta-orang> (diakses pada 28 Februari 2024).
- Databoks.katadata.co.id. (2023). *Ini Wilayah Jawa Tengah dengan Penerima Kartu Prakerja Terbanyak*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/20/ini-wilayah-jawa-tengah-dengan-penerima-kartu-prakerja-terbanyak> (diakses pada 15 Januari 2024).
- Datareportal.com. (2020). *Digital 2020 Indonesia*. Datareportal.Com. <https://datareportal.com/reports/digital-2020-indonesia> (diakses pada 27 Januari 2023).
- Dinperinaker.pekalongankota.go.id. (2023). *E-Makaryo dan Kartu Pra Kerja*. Dinperinaker Pekalongan. <https://dinperinaker.pekalongankota.go.id/berita/emakaryo-dan-kartu-prakerja.html> (diakses pada 30 Oktober

- 2023).
- Ginting, M. L. B. ; Herdiyana, R. (2020). Peran Pemerintah Pada Kebijakan Kartu Prakerja Dalam Memulihkan Kesejahteraan Pekerja Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Analis Kebijakan*, 4(2), 1–15.
- Hardiansyah, A. W. (2022). *Implementasi Program Kartu Prakerja di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya*. Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
- Indonesia.go.id. (2021). *Jangkau 11,4 Juta Penerima, Kartu Prakerja Lanjut Tahun Depan*. Indonesia.Go.Id. <https://www.indonesia.go.id/kategori/editorial/3548/jangkau-11-4-juta-penerima-kartu-prakerja-lanjut-tahun-depan> (diakses pada 28 Februari 2024).
- Islamy, I. (2014). *Materi Pokok Kebijakan Publik* (Modul 1). Jakarta: Universitas Terbuka.
- Jateng.bps.go.id. (2023). *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (Persen), 2020-2022*. BPS Jateng. <https://jateng.bps.go.id/indicator/6/64/1/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt.html> (diakses pada 19 Januari 2023).
- Jatengprov.go.id. (2023). *E-Makaryo, Cara Ganjar Beri Kemudahan Warga Cari Kerja*. Jatengprov.Go.Id. <https://jatengprov.go.id/publik/e-makaryo-cara-ganjar-beri-kemudahan-warga-cari-kerja/> (diakses pada 17 Februari 2024).
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: UNG Press.
- Kemenko Bidang Perekonomian. (2020). *Laporan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Tahun 2020*. Jakarta: Kemenko Bidang Perekonomian.
- Kemenko Bidang Perekonomian. (2021). *Laporan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Tahun 2020*. Jakarta: Kemenko Bidang Perekonomian.
- Kemenko Bidang Perekonomian. (2020). *Laporan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Tahun 2020*. Jakarta: Kemenko Bidang Perekonomian.
- Kompaspedia.kompas.id. (2023). *Kota Pekalongan: Geliat Sentra Batik dan Perdagangan di Pesisir Pantura*. Kompas. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/daerah/kota-pekalongan-geliat-sentra-batik-dan-perdagangan-di-pesisir-pantura> (diakses pada 5 Januari 2024).
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Marnis, P. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Ningrum, H. S.; Wijayanto; Taufiq, A. (2022). *Journal of Politic and Government Studies*, 11(4), 160–171.
- Nurhadi, W. (2020). *Implementasi Kebijakan Program Kartu Prakerja Di Tengah Pandemi Covid-19*. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Pekalonganinfo.com. (2022). *Dinperinaker Terus Tekan Angka Pengangguran*. Pekalonganinfo.Com. <https://www.pekalonganinfo.com/berita/dinperinaker-terus-tekan-angka-pengangguran/> (diakses pada 17 Februari 2024).
- Pekalongankota.bps.go.id. (2023). *Laju Pertumbuhan PDRB 2020-2022*. BPS Kota Pekalongan. <https://pekalongankota.bps.go.id/indicator/52/241/1/laju-pertumbuhan-pdrb.html> (diakses pada 5 Januari 2024).
- Pekalongankota.go.id. (2022). *Digelar Rutin, Dinperinaker Terus Tumbuhkan Tenant Binaan*. Pemerintah Kota Pekalongan. <https://pekalongankota.go.id/berita/digelar-rutin-dinperinaker-terus-tumbuhkan-tenant-binaan.html> (diakses pada 15 Januari 2024).
- Pekalongankota.go.id. (2023a). *Aplikasi Si Ganteng Brayon Kerjo Siap*

- Diluncurkan*. Pekalongankota.Go.Id. <https://jatengprov.go.id/publik/e-makaryo-cara-ganjar-beri-kemudahan-warga-cari-kerja/> (diakses pada 17 Februari 2024).
- Pekalongankota.go.id. (2023b). *Geografi*. Pemerintah Kota Pekalongan. <https://pekalongankota.go.id/halaman/geografi.html> (diakses pada 5 Januari 2024).
- Pekalongankota.go.id. (2020). *Dinperinaker Mulai Data Calon Penerima Kartu Prakerja*. Pekalongankota.Go.Id. <https://pekalongankota.go.id/berita/dinperinaker-mulai-data-calon-penerima-kartu-prakerja.html> (diakses pada 6 Februari 2024).
- Pekalongankota.go.id. (2022). *Dinperinaker Ajak Pencari Kerja Gigih Berusaha*. Pekalongankota.Go.Id. <https://pekalongankota.go.id/berita/dinperinaker-ajak-pencari-kerja-gigih-berusaha.html> (diakses pada 17 Februari 2024).
- Prakerja.go.id. (2020). *Tentang Kartu Prakerja*. Prakerja.Co.Id. <https://www.prakerja.go.id/> (diakses pada 30 Oktober 2023).
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: Unisri Press.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Santoso, P. (2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Polgov UGM.
- Sari, E. (2009). *Pengembangan Sumber Daya Manusia: Pedoman Meningkatkan Kompetensi Pegawai Secara Tepat*. Jakarta: Jayabaya University Press.
- Satudata.kemnaker.go.id. (2023). *Penerima Manfaat Kartu Prakerja Gelombang 1-47 se-Indonesia*. Kemnaker. <https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/1142> (diakses pada 1 Januari 2024).
- Sedarmayanti. (2017). *Bedah Buku Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Surabaya: Universitas Dr. Soetomo.
- Septiyadi, M. R., & Rahayu, E. (2022). Program Kartu Prakerja sebagai Program Pemberdayaan di Bidang Ketenagakerjaan di Tengah Pandemi. *Jurnal Pembangunan Manusia*, 3(2), 1–11.
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi, dan Evaluasi*. Surabaya: Brilliant.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, I. K. (2014). *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Widjaja, H. (2002). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Rajawali Pres.
- UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Perpres No. 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Kartu Prakerja
- Perpres No. 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja
- Perwalkot No. 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan